

DEMONSTRASI DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA DAN DAMPAKNYA BAGI HUBUNGAN INTERNASIONAL

7

Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Demonstrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia oleh banyak rezim dikhawatirkan berkembang ke negara mereka. Keterpurukan ekonomi, kesenjangan sosial, pengangguran, naiknya harga BBM dan kesulitan hidup telah memicu protes di mana-mana. Respons aparat yang eksekutif telah memicu munculnya berbagai pelanggaran HAM, terutama tewasnya ratusan warga dalam jumlah besar, dan juga aksi pembakaran oleh rakyat dan munculnya kerusuhan. Meluasnya pelanggaran HAM dan implikasinya atas prospek ekonomi dan politik di tingkat regional dan global telah melahirkan kekhawatiran negara maju. Merebaknya aksi protes massa sejagad dan penanganannya yang tidak proporsional telah membuat PBB memberi perhatian khusus, dengan mengingatkan pemerintah nasional negara yang bermasalah agar menghormati kontrak sosial yang telah mereka buat dan sensitif terhadap tuntutan masyarakat. PBB mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi, dan menghormati HAM warga yang absah dalam mengekspresikan pendapat mereka. Pemerintah Indonesia harus dapat memetik pelajaran dari maraknya protes massa di berbagai negara dan runtuhnya rezim-rezim yang tidak mau peduli.

Pendahuluan

Di Eropa, protes massa kelompok 'Gilets Jaunes' menarik warga Prancis ke jalan-jalan selama beberapa minggu, dari November 2018 hingga sekarang (*Media Indonesia*, 18 November 2019). Aksi yang terjadi setiap minggu dan semula berlangsung tertib ini kemudian menjadi bentrokan serius, dengan aksi pembakaran di Paris dan kota-kota besar lain dan kekerasan aparat keamanan.

Demonstrasi didukung luas kelas menengah karena kebijakan finansial pemerintah dinilai amat diskriminatif dan menguntungkan kelompok kaya.

Di Asia, kasus Hong Kong menandai unjuk rasa fenomenal anak-anak muda milenial yang tidak kenal takut menentang tekanan elit politik domestik dan rezim otokrasi Beijing. Protes massa dipimpin tokoh belasan tahun, Joshua Wong dan Agnes



Chow, sejak RUU Ekstradisi yang akan mengirim tertuduh kriminal diadili di China daratan, dibahas di parlemen pada Juli 2019. Demonstrasi melahirkan tekanan massa yang besar sejak Oktober 2019.

Gelombang demonstrasi yang melumpuhkan Hong Kong memicu perhatian dunia internasional, terutama dari PBB, Inggris, AS dan UE. Beijing mengancam diplomat Inggris untuk tidak intervensi. Ia juga mengancam Presiden AS, Donald Trump, yang mengingatkan Beijing menghormati hak demokrasi warga. Senat AS pun mengeluarkan RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong, yang bisa mengenakan sanksi AS atas pejabat China dan eks koloni Inggris itu (*Republika*, 21 November 2019). Kekhawatiran warga pada otoritas domestik dan Beijing yang tidak melindungi prinsip 'satu negara dua sistem', menjadi penyebab aksi protes massa yang tidak berhenti.

Di Timur-Tengah, 'Arab Spring I' yang muncul di tahun 2010 dan setengah sukses kembali menghadapi tantangan. Di Lebanon, rezim hasil pemilu demokratis di bawah Saad Hariri mengalami tekanan yang hebat, karena janji pemilu yang tidak memberi masa depan bagi rakyat. Krisis keuangan, naiknya pajak, meluasnya kemiskinan dan pengangguran berhasil mempersatukan rakyat Lebanon yang majemuk dalam agama dan ideologi menentang kekuasaan Hariri yang baru kurang setahun, yang didukung Hezbollah dan sekutu Syiahnya, Iran. Di Irak, krisis sosial-ekonomi serupa telah memicu warga di berbagai kota turun ke jalan secara masif. Sedangkan Iran, yang semula

tampak damai, kini dilanda demonstrasi di seluruh negeri akibat kenaikan harga dan penajahan BBM. Demonstrasi diwarnai pembakaran dan kekerasan, dengan 106 warga tewas, di sela laporan 200 warga terbunuh (*Republika*, 21 November 2019).

Di belahan dunia lain, Amerika Latin, aksi protes massa tidak pernah berhenti. Demonstrasi telah menjadi penyakit menular tidak hanya bagi rakyat Meksiko di utara, namun juga Venezuela, Bolivia dan Chile, di selatan benua Amerika. Salah kelola negara, yang berujung pada krisis ekonomi dan politik berkepanjangan telah menyebabkan rezim nasional, bahkan yang sangat antusias dengan kampanye sosialisasinya, kehilangan dukungan. Di Chile, demonstrasi dipicu naiknya tarif transportasi sebesar 4% (*Rakyat Merdeka*, 15 November 2019). Tulisan ini mengkaji mengapa demonstrasi bermunculan dan bertahan lama di berbagai belahan dunia dan sulit diatasi. Selain itu juga akan dibahas siapa para aktor serta implikasinya di negara-negara yang mengalami dan bagi situasi internasional dewasa ini.

Aktor dan Penyebab Demonstrasi Berkepanjangan

Situasi dunia sepanjang tahun 2019 diwarnai maraknya aksi unjuk rasa di berbagai negara. Demonstrasi sebagai refleksi perasaan dan pendapat, serta pernyataan sikap individu warga negara adalah hak dasar atau asasi warga yang dilindungi oleh Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang diadopsi di Paris tahun 1948. Aksi ini dinilai lumrah dan merupakan pemandangan sehari-hari di

negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Aktivitas politik ini diakui secara universal dan dibenarkan secara konstitusional dan dalam Undang-Undang (UU) yang berlaku di negara yang telah mengadopsi demokrasi. Ia tidak boleh dilarang, apalagi dihentikan, dengan respons represif, selama ia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam UU nasional. Namun, tetap saja menimbulkan ketakutan bagi rezim yang menghadapinya.

Mengapa orang melakukan demonstrasi? Alasannya di berbagai tempat dan negara bisa berbeda dan beragam. Dari berbagai aksi yang muncul, keresahan massa yang terakumulasi kontinu tanpa solusi, yang bermula dari keresahan individu-individu warga yang kemudian meluas, adalah penyebabnya. Pemicunya adalah masalah warga yang tidak memperoleh perhatian dan solusi pemerintah yang memuaskan sejak lama, sehingga melahirkan ketidakpuasan yang meluas, yang terus dibiarkan berkembang, tanpa solusi efektif, akibat absennya respons pemerintah.

Aksi unjuk rasa adalah sebuah aktivitas individual warga yang biasa di negara-negara yang menganut dan menghormati kebebasan berekspresi secara sah dan konstitusional. Tetapi, jika aktivitas itu berlangsung kontinu dalam waktu lama, tanpa tanda-tanda jelas kapan berakhir, akan berdampak kontraproduktif terhadap stabilitas politik negara. Dalam situasi terburuk, demonstrasi yang meluas dan kontinu dapat memaksa rezim mundur, akibat tekanan politik dan kekerasan yang menyertainya.

Aksi massa yang tidak terkendali, bersama respons aparat

keamanan di luar batas, akan menyulut pelanggaran HAM dan memicu perhatian dunia, sekaligus kecaman. Aksi demonstrasi massa yang terjadi di berbagai negara berimplikasi pada terganggunya aktivitas pemerintahan sehari-hari, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik regional. Jika terjadi secara sporadis di banyak negara dapat mempengaruhi iklim dan stabilitas politik di tingkat global. Sebab, kerja sama internasional akan terganggu akibat kelumpuhan ataupun pergantian rezim. Tidak pernah terjadi dalam sejarah, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberi perhatian serius terhadap maraknya demonstrasi di berbagai negara karena dampak serius yang diakibatkannya terhadap stabilitas politik dan keamanan global (*Media Indonesia*, 8 November 2019).

Sebaliknya, jika aksi unjuk rasa di banyak negara tidak berlangsung kontinu, yang menandakan sistem politik demokrasi telah bekerja dengan baik, stabilitas politik nasional dan regional akan terjaga. Sehingga, situasi politik dan stabilitas keamanan global tetap kondusif dalam mendorong dan meningkatkan kerja sama antarnegara.

Implikasi Internasional

Aksi aparat keamanan dengan tindakan yang kian represif, dan pengunjuk rasa yang semakin berani menggunakan panah dan bom Molotov, serta merebut senjata, melumpuhkan Hong Kong sebagai salah satu pusat finansial dunia. AS pun mengecam respons aparat Hong Kong yang eksekutif (*Republika*, 19 November 2019) dan Beijing mengeluarkan peringatan

keras pada AS agar menghentikan sikapnya mencampuri urusan domestik China (*Media Indonesia* dan *Republika*, 22 November 2019). Padahal, pemerintah dan parlemen Hong Kong telah menarik RUU Ekstradisi yang memicu persoalan. Di Perancis, dengan pengalaman demokrasi yang sangat maju, aksi protes massa berkepanjangan berdampak serupa, memunculkan anarkisme.

Di Lebanon, tekanan protes massa yang besar dan kontinu telah memaksa Presiden Hariri mundur. Dukungan kelompok garis keras Hezbollah yang ditakuti, dan kelompok Syiah Iran yang kuat di kawasan kehilangan makna. Sektarianisme telah kehilangan daya tariknya, tidak hanya di Lebanon, namun juga di Irak. PM Adel Abdul Mahdi terprovokasi bertindak melampaui batas, sehingga aparat keamanan melepaskan tembakan, dan 260 lebih warga tewas (*Kompas*, 11 November 2019).

Di Iran, rezim Mullah bertindak represif, sehingga AS mengutuk Iran atas penggunaan senjata mematikan dan pembatasan komunikasi (*internet*). Jerman pun mengingatkan Iran agar menghormati aksi protes yang absah. Sebaliknya, Pemerintah Iran menuding AS berpihak pada perusuh, pihak yang melakukan konspirasi dengan musuh Iran (*Jakarta Post*, 21 November 2019). Sukses 'Arab Spring I' dipertanyakan, apakah akan berakhir total, seperti di Tunisia dan Mesir, ataukah memotivasi muncul kembali 'Arab Spring II' seperti di Lebanon dan Irak?

Jika di Venezuela dan Chile, rezim masih bisa bertahan dengan segala macam cara, walaupun

telah mengalami tekanan sekaligus kehilangan kredibilitas internasionalnya, di Bolivia, aksi protes massa telah mengakibatkan jatuhnya rezim, terlepas dari adanya intervensi militer. Evo Morales, Presiden Bolivia, pengusung sosialisme ala Chavez, mengungsi ke Meksiko. Sedangkan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, masih bisa bertahan dari kuatnya tekanan internasional, terutama AS. Begitu pula, Sebastian Pinera, Presiden Chile, dengan solusi brutal aparatnya, sehingga menimbulkan kecaman internasional. Sejuta massa turun ke jalan menentang kebijakan Pinera, sejak Chile kembali ke demokrasi tahun 1990 (*New York Times*, 21 November 2019).

Keprihatinan PBB

Protes massa telah memunculkan kekhawatiran PBB, yang misi dan tugasnya mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Terbilang jarang PBB mengungkapkan keprihatinan atas aksi demonstrasi di negara anggotanya. Melihat maraknya protes massa di berbagai belahan dunia, setelah jatuhnya korban besar di Irak, Sekjen PBB Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan mengingatkan pemerintah negara yang dilanda demonstrasi (*Kompas*, 11 November 2019). Ketua Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet, juga prihatin atas krisis di Bolivia karena kerasnya penindakan aparat.

Guterres menyatakan pemerintah agar peduli dengan kontrak sosial mereka dengan warga. Ia menyerukan aspirasi rakyat pendemo di Timur-Tengah, Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin didengar, dan para penguasa menghindari

defisit kepercayaan. Penguasa diserukan agar menghormati HAM, terutama hak warga untuk didengar pendapatnya. Penguasa juga diingatkan agar menyadari dampak meningkatnya kesenjangan informasi dan sosial-ekonomi secara drastis akibat globalisasi dan teknologi baru.

Penutup

Meningkatnya kesenjangan sosial dan kesulitan hidup telah memicu warga melakukan demonstrasi masif. Kegagalan pemerintah nasional dalam meredam aksi, telah menyebabkan demonstrasi berkepanjangan, yang sulit diatasi, sehingga mendorong aksi represif aparat, dan kemudian memicu kerusuhan dan anarkisme. Aksi unjuk rasa di berbagai belahan dunia berdampak hebat atas prospek demokrasi, serta stabilitasi politik dan keamanan di tingkat domestik dan global.

Dalam beberapa kasus terkini, tekanan pendemo telah memaksa penguasa mundur, selain mengundang kecaman internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi. *Travel warning* telah dikeluarkan beberapa negara demi melindungi keselamatan warganya. Gelombang demonstrasi di Hong Kong hingga Santiago mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan, serta iklim ekonomi dan investasi global. Para pemimpin negara harus menyadari keadaan buruk ini, sehingga harus meningkatkan komitmen atas penyampaian ekspresi secara bebas dan perlindungan HAM warga.

Indonesia juga tidak luput dari berbagai aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu terkait pelaksanaan pemilu dan hasil-

hasilnya. Walaupun kemudian dapat diatasi, pemerintah harus dapat memetik pelajaran dari maraknya protes massa di berbagai negara dan runtuhnya rezim-rezim yang tidak mau peduli.

Pemerintah perlu memperhatikan peringatan PBB mengenai perlunya mengevaluasi kebijakan yang tidak relevan dan konsisten dengan kebutuhan rakyat dan kontrak sosial yang dibuat. Mereka harus mengedepankan tindakan proporsional dan anti-kekerasan dalam menangani ketidakpuasan warga yang disampaikan lewat ekspresi mereka dengan aksi unjuk rasa.

Referensi

- Agustin, Dwina. (2019). "Senat AS Dukung RUU Soal Hong Kong," *Republika*, 21 November 2019, hal. 7.
- Campos, Rodrigo. (2019). "Investors wary as social unrest spread from Hong Kong to Santiago," *The Jakarta Post*, 12 November 2019, hal. 9.
- Dikarma, Kamran dan Dwina Agustin. (2019). "AS Kecam Aparat Hong Kong," *Republika*, 19 November 2019, hal. 8.
- Havasi, Amir. (2019). "Iran slams US show of support for rioters." *The Jakarta Post*, 19 November 2019, hal. 13.
- "Irak Wajib Lindungi Hak Hidup Warga," *Kompas*, 11 November 2019, hal. 4.
- K. Susthira, Melalusa. (2019). "AS Loloskan RUU HAM Hong Kong." *Media Indonesia*, 21 November 2019, hal. 18.
- "Kumpulkan Pangdam & Kapolda, Jokowi Minta Kawal Agenda Strategis," *Rakyat Merdeka*, 15 November 2019, hal. 6.

- McDonald, Brent. (2019). "Price of protesting in Chile." *The New York Times International Edition*, November 21, 2019, hal. 3.
- "PBB Khawatirkan Krisis Bolivia," *Koran Jakarta*, 18 November 2019, hal. 8.
- Rostiyani, Yeyen. (2019). "Cina Peringatkan AS Agar tak Salah Langkah," *Republika*, 22 November 2019, hal. 7.
- Salengke, Haufan Hasyim. (2019). "Warga Iran Protes Harga BBM Naik 50%," *Media Indonesia*, 18 November 2019, hal. 18.
- "Sekjen PBB Kecam Penggunaan Peluru Tajam." *Media Indonesia*, 8 November 2019, hal. 18.
- "Tiongkok Desak AS Tidak Intervensi Soal Hong Kong," *Suara Pembaruan*, 19 November 2019, hal. 14.
- "Tiongkok Keluarkan Peringatan Keras ke AS," *Media Indonesia*, 22 November 2019, hal. 18.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwids-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis" (2015), "Ancaman Keamanan terhadap ALKI" (2015), dan "Indonesia di Tengah Persaingan China, Jepang, dan India" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.